BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, upaya untuk pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan yaitu dengan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transaparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria karakterikstik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Merliana, 2020). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, selanjutnya Badjuri dan Trihapsari (2014) mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah akan digunakan untuk beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Untuk itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Xu et al (2015) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. *Governmental Accounting Standard Board* (1999) dalam *Concepts Statement* No.1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan dari pemerintah daerah akan digunakan beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, maka informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Mulia, 2018). Jadinya pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan suatu produk yang dihasilkan dari bidang atau disiplin akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas (Windiyastuti, 2016).

Begitu juga entitas pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi

pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tertang pemerintahan (Windiyastuti, 2016). Laporan keuangan pemerintah bermanfaat memberikan informasi bagi *stakeholder* yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dipahami dan digunakan untuk pemakai serta pemakai mempercayai informasi tersebut. Suwarjono (2014) menyatakan informasi keuangan harus bermanfaat bagi pemakai sama seperti informasi tersebut harus mempunyai nilai. Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah meningkatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan misi oraganisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo 2015). Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya yang kompeten yang didukung latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapakan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan pelaporan yang dibuat dan tidak kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia adalah faktor terpenting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, keberhasilan suatu entitas bukan hanya dari sumber daya manusia saja namun juga kompetensi sumber daya mausia yang dimilkinya, dalam hal ini kompetensi memiliki peranan penting untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (kadek dkk, 2014).

Dalam Perspektif Islam menjelaskan pencatatan informasi laporan keuangan merupakan kegiatan muamalah yang mempunyai makna segala kegiatan yang diakukan dalam rangka perbaikan hubungan antar sesama manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupan dunia. Salah satu kegiatan muamalah ialah pencatatan keuangan atau yang sering disebut dengan Akuntansi. Dari sudut pemakai akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk

membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditur, pemerintah dan sebagainya. Sedangkan dari sudut proses kegiatan akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Allah SWT telah menegaskan tentang kebaikan bersama orang-orang yang jujur dalam Q.S At-Taubah Ayat 119 yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ“

yā ayyuhallażīna āmanuttaqullāha wa kụnụ ma'aṣ-ṣādiqīn

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar."

Surat At Taubah ayat 119 ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada manusia yang beriman untuk bertaqwa. Mereka harus melaksanakan perintah Allah SWT serta menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa manusia harus berkumpul dengan orang-orang yang benar. Maksudnya adalah ketika mencari teman, hendaklah melihat apakah orang tersebut akan menjadi teman yang baik dan akan membawa kamu lebih dekat kepada kebaikan dunia serta akhirat. Selain itu, diharapkan untuk dapat membedakan teman yang hanya membawamu kepada hal yang sesat.

Berdasarkan ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ayat ini dapat di jadikan landasan seorang akuntan dalam bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi dan pengeluaran dalam laporan keuangan sesuai dengan posisinya atau dengan benar dan jujur. Sebagaimana yang diungkapkan dalam standar akuntansi pemerintahan bahwa laporan keuangan berkualitas.

Untuk dapat menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, dibutuhkan pengelola keuangan yang kompeten dalam bidangnya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga tidak terlepas dari pengaruh sumber daya manusia. Menurut Sukmaningrum (2018) Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memliki sumber daya yang kompeten, agar dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, tak hanya itu laporan yang dihasilkan juga harus memiliki nilai kewajaran dalam penyajiannya, penilaian kewajaran laporan keuangan akan dilakukan oleh Lembaga negara yang bertugas dalam memeriksa laporan keuangan dan memperoleh opini. Untuk mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan harus melalui beberapa proses diantaranya sesuai reputasi pemerintah, instansi bersangkutan, sistem pengendalian keuangan yang baik, transparansi dan sebagainya. Selain itu, syarat utama tercapainya opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Dearah adalah keterbukaan dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang dikuasai pemerintah daerah tersebut dan juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku . Keterbukaan tersebut perlu didukung dengan bukti - bukti yang relevan dan valid sehingga dapat ditelusuri serta dan diuji BPK. Agar Laporan Keuangan Pemerintah Dearah dapat mencapai opini WTP, biasanya BPK akan meminta adanya wujud komitmen perbaikan serta tata kelola keuangan secara nyata dan terarah. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Ramanda (2015) mengartikan bahwa penerapan SAP berbasis akrual adalah untuk memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dari pada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. Akuntansi basis akrual diyakini juga dapat memberikan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Informasi keuangan yang dihasilkan dari basis akrual dapat mengurangi kesempatan atas kecurangan dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja, serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas dan

transparansi memerankan peran yang sangat bernilai pada pelaksanaan pemerintah salah satunya pada pengelolaan keuangan, dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud ditambah dengan penerapan standar akuntansi pemerintah dalan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi.

Diprovinsi Gorontalo sendiri dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo hasil audit laporan keuangan oleh BPK untuk pemerintah daerah Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2019-2023 menunjukan hasil yang baik, yang ditandai dengan pemberian opini WTP dari BPK, Hal ini membuktikan adanya keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akan tetapi BPK menambahkan catatan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tentang adanya kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) berupa pengawasan dari inspektorat yang masih kurang terkait masalah administrasi yaitu tagihan-tagihan yang sering terlambat dan juga kesalahan penyajian laporan keuangan,serta sumber daya manusia (SDM) yang ada di SKPD masih kurang menaati peraturan terkait penerapan SAP, masalah in tentunya tidak bisa dianggap sepele oleh pemerintah daerah karena akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Meliana (2020) bahwa sumber daya manusia pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Bahri (2016) laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, harus dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas, selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian (2018) penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kualitas laporan keuangan.

Kedua penelitian tersebut mengartikan betapa pentingnya sumber daya manusia dan standar akuntansi permerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, laporan keuangan yang berkualitas memang menjadi harapan setiap lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan kepada

pemerintah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Mengingat penting dan besarnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah, maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menggunakan SDM yang tepat untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan guna mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan kepada pemerintah. Dari penjelasan dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan judul penelitian "**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena penelitian diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1.2.1 Kurangnya pengawasan dari Sistem Pengendalian Internal (SPI)

1.2.2 Masih ada SKPD yang tidak menaati SAP

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui :

1.4.1 Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI)

1.4.2 Analisis Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

1.5.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur serta bukti tambahan untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah

pengetahuan pembaca mengenai ilmu akuntansi khususnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Gorontalo

1.5.3 Manfaat Bagi Peneliti

Adapun manfaat yang diperoleh peneliti adalah dapat belajar cara menidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik, mengetahui sistem kerja objek yang diteliti, menambah keyakinan dan penambahan suatu masalah, meningkatkan hubungan kerja sama antara rekan kerja, melatih diri dalam bertanggung jawab serta bertambahnya wawasan.